

Implementasi Program Kredit Kukar Idaman dalam Pengembangan UMKM di Kabupaten Kutai Kartanegara

Andi Zihan Fahdila¹, Muhammad Reza Fahlevy²

^{1,2,3} Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Vol. 13, No. 1
Page : 1-6
Published : 2025

KEYWORDS

Implementasi, Program Kredit Kukar Idaman

CORRESPONDENCE

Phone: +6282150207540
E-mail: Zihanfahdila16@gmail.com

A B S T R A C T

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Kredit Kukar Idaman di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini berfokus pada bagaimana program ini mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Pengumpulan data dilakukan secara purposive sampling melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa program yang telah dilaksanakan sejak tahun 2021 ini berperan penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM, mendukung kegiatan ekonomi lokal, dan membantu penerima manfaat dalam mengelola risiko dan likuiditas. Namun, program ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam menjangkau daerah-daerah terpencil di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang membatasi dampaknya secara keseluruhan.

INTRODUCTION

Kabupaten Kukai Kartanegara adalah kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki potensi besar bagi pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu prioritas utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah pengembangan UMKM, sejalan dengan visi pembangunan daerah berkelanjutan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam pengembangan UMKM adalah dengan memberikan dukungan keuangan, pelatihan, konsultasi, dan akses ke pasar. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif pajak dan fasilitas lainnya bagi UMKM yang telah mengembangkan usahanya dengan baik. Pengembangan UMKM juga penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, di mana UMKM yang berkembang dapat menjadi sumber daya manusia dan modal yang penting untuk pertumbuhan ekonomi di masa depan. Oleh karena itu, pengembangan UMKM perlu terus didorong dan ditingkatkan, baik oleh

pemerintah maupun pihak swasta, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah meluncurkan berbagai program untuk mendukung pengembangan UMKM, Salah satunya melalui Program Kredit Kukar Idaman. Program ini menawarkan akses permodalan dengan bunga nol persen kepada pelaku UMKM. Tujuan Program ini adalah untuk membantu UMKM meningkatkan kapasitas produksinya, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing dipasar lokal maupun nasional.

Program Kredit Kukar Idaman adalah sebuah inovasi program kredit yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, Indonesia. Program Kredit Kukar Idaman tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Kukar Nomor: B-2796/EK.III/06511/10/2022.

Program Kredit Kukar Idaman merupakan sebuah program yang dirancang oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian

masyarakat di daerah tersebut. Program Kredit Kukar Idaman memiliki Beberapa keunggulan yang membedakannya dari program kredit lainnya. Pertama, program ini memberikan bunga kredit yang sangat rendah, bahkan nol persen untuk sektor produktif seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan sebagainya. Kedua, proses pengajuan kredit sangat mudah dan cepat dengan syarat dan ketentuan yang transparan dan mudah dipahami oleh masyarakat. Ketiga, program ini juga menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi penerima kredit untuk memastikan keberhasilan usaha mereka. Melalui Program Kredit Kukar Idaman, diharapkan masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka dan mengurangi kemiskinan. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengembangkan program kredit yang inovatif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Namun, masih banyaknya kendala dalam Program kredit Kukar Idaman ini yakni, proses perizinan dan regulasi yang dianggap kompleks menjadi kendala bagi pelaku UMKM. Beberapa UMKM masih beroperasi secara informal karena proses formalitas yang dianggap sulit, terutama bagi UMKM yang memiliki kapasitas terbatas dalam mengurus perizinan usaha. Hal ini membatasi mereka dalam mengakses program bantuan dari pemerintah atau lembaga keuangan.

Penelitian ini akan membahas tentang pengimplementasian dan aspek-aspek penting seperti tingkat aksesibilitas informasi mengenai program kredit kukar idaman, kesesuaian persyaratan pinjaman dengan kebutuhan UMKM, efisiensi proses aplikasi dan persetujuan pinjaman, alokasi dana yang memadai, serta kualitas pendampingan dan pelatihan yang disediakan kepada UMKM penerima kredit. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian implementasi program Kredit Kukar Idaman dalam rangka upaya pengembangan UMKM di Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya di Kecamatan Tenggarong.

THEORETICAL FRAMEWORK

1. Kebijakan Publik dan Implementasi

Kebijakan publik secara umum dipahami sebagai keputusan pemerintah yang dirancang untuk menyelesaikan masalah publik dan mencapai tujuan tertentu (Anderson, 2019). Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan dipahami melalui teori Pressman dan Wildavsky (1973), yang menekankan bahwa implementasi bukan sekadar menjalankan aturan, tetapi juga proses mewujudkan tujuan kebijakan melalui koordinasi antar-aktor, ketersediaan sumber daya, serta efektivitas komunikasi. Model ini dipilih karena relevan untuk menilai sejauh mana Kukar Idaman Credit Program berjalan sesuai desain kebijakan, sekaligus mengidentifikasi faktor penghambat yang muncul di lapangan.

2. Konsep Kredit

Kredit pada dasarnya merupakan pemberian dana dari lembaga keuangan kepada debitur dengan kewajiban pengembalian sesuai syarat yang disepakati (Kasmir, 2016). Analisis kredit biasanya menggunakan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition), yang menilai aspek kepribadian, kemampuan membayar, modal, jaminan, dan kondisi usaha. Prinsip ini menjadi acuan untuk menilai efektivitas program pembiayaan UMKM.

3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, UMKM adalah unit usaha produktif dengan kriteria tertentu berdasarkan aset dan omzet. UMKM memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi daerah, penyedia lapangan kerja, dan penopang ekonomi lokal. Oleh karena itu, kebijakan pembiayaan melalui Kukar Idaman Credit Program dapat dilihat sebagai instrumen untuk memperkuat daya saing UMKM.

4. Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan uraian teori, penelitian ini menggunakan kerangka pikir sebagai berikut:

- Kebijakan Publik → Implementasi: Dinilai dengan teori Pressman & Wildavsky, menekankan pada

koordinasi, sumber daya, dan pencapaian tujuan.

- Kredit → Prinsip 5C: Menjadi instrumen untuk menilai kelayakan kredit yang diberikan pada UMKM.
- UMKM → Dampak Ekonomi Lokal: Implementasi program kredit dievaluasi dari kontribusinya terhadap pertumbuhan UMKM di Kutai Kartanegara.

Dengan kerangka ini, analisis penelitian diarahkan pada bagaimana implementasi Kukar Idaman Credit Program mendukung UMKM, apa faktor pendukungnya, serta apa hambatannya terutama dalam konteks aksesibilitas wilayah dan efektivitas kebijakan.

METHOD

Penelitian mengenai Implementasi Program Kredit Kukar Idaman dalam Upaya Pengembangan UMKM di Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam dinamika implementasi program dalam konteks sosial dan kelembagaan setempat.

Informan dipilih menggunakan purposive sampling dengan kriteria: (1) pejabat pemerintah daerah yang terlibat langsung dalam perumusan dan implementasi Kukar Idaman Credit Program (Diskop-UKM, Bappeda, dan pihak perbankan daerah), serta (2) pelaku UMKM penerima manfaat program di Kecamatan Tenggarong. Total informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang, terdiri dari 5 pejabat pemerintah/instansi terkait dan 7 pelaku UMKM penerima kredit. Data dikumpulkan melalui:

- Wawancara mendalam dengan informan kunci (pejabat pemerintah, bank penyalur, dan pelaku UMKM).
- Observasi langsung terhadap pelaksanaan program di lapangan, khususnya pada aktivitas UMKM penerima kredit.

- Dokumentasi berupa laporan resmi, peraturan, serta data statistik terkait program dan UMKM di Kutai Kartanegara.
- Studi kepustakaan untuk memperkuat kerangka konseptual dan membandingkan dengan temuan penelitian sebelumnya.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pejabat pemerintah, pelaku UMKM, dan dokumen resmi. Triangulasi teknik dilakukan dengan memadukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan pengumpulan data pada beberapa kesempatan berbeda untuk memastikan konsistensi informasi. Selain itu, digunakan member checking dengan mengonfirmasi hasil wawancara kepada informan agar interpretasi peneliti sesuai dengan realitas lapangan.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles & Huberman (1994) yang meliputi:

- Pengumpulan Data → mengumpulkan informasi melalui wawancara, observasi, dan dokumen.
- Reduksi Data → memilah, mengelompokkan, dan menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian.
- Penyajian Data → menyusun data dalam bentuk narasi, tabel, dan bagan untuk mempermudah pemahaman.
- Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi → menyimpulkan temuan penelitian secara induktif serta memverifikasi melalui triangulasi dan member checking.

Secara ringkas, alur analisis penelitian ini dapat digambarkan melalui bagan berikut (berdasarkan Miles & Huberman): Data Collection → Data Reduction → Data Display → Conclusion/Verification.

RESULT AND DISCUSSION

Analisis Implementasi Program Kredit Kukar Idaman

Program Kredit Kukar Idaman terbukti memberikan sejumlah manfaat nyata bagi pelaku UMKM di Kecamatan Tenggarong. Kemudahan utama yang dirasakan adalah bunga kredit 0% untuk plafon maksimal Rp25.000.000 dengan jangka waktu hingga 24 bulan, serta prosedur pengajuan yang relatif sederhana. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada pinjaman informal.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Kota Tenggarong, program ini telah membantu banyak pelaku usaha kecil dalam memperoleh modal tanpa harus terbebani oleh bunga tinggi. Salah seorang penerima manfaat menuturkan: “Proses pengajuan hanya butuh waktu sekitar dua minggu, dan kami tidak diminta jaminan yang memberatkan. Itu sangat membantu usaha saya untuk menambah stok barang.”

Namun, temuan lapangan juga menunjukkan adanya kendala. Beberapa UMKM masih belum mengetahui secara jelas prosedur pengajuan karena sosialisasi program tidak merata. Selain itu, keterbatasan kapasitas usaha formal membuat sebagian pelaku UMKM sulit memenuhi persyaratan administratif. Temuan ini serupa dengan penelitian lain mengenai program kredit daerah di Jawa Tengah yang menunjukkan bahwa akses kredit murah belum sepenuhnya inklusif karena faktor literasi keuangan dan regulasi (lihat misalnya Rahman, 2021).

Karakteristik Kredit Kukar Idaman

Hadirnya Program Kredit Kukar Idaman memberikan dampak signifikan bagi pelaku UMKM di Kecamatan Tenggarong. Program ini dianggap lebih ramah dibandingkan layanan perbankan komersial karena bunga kredit 0%, persyaratan sederhana, serta proses pengajuan yang relatif cepat. Salah satu pelaku usaha kuliner menuturkan: “Proses pengajuan hanya butuh waktu sekitar dua minggu dan kami tidak diminta

jaminan yang memberatkan. Itu sangat membantu usaha saya untuk menambah peralatan dapur.”

Kesederhanaan SOP dalam program ini meningkatkan rasa percaya diri masyarakat untuk mengakses kredit. Banyak pelaku UMKM yang sebelumnya enggan berhubungan dengan bank kini merasa lebih yakin mengajukan pinjaman. Hal ini berimplikasi pada peningkatan jumlah UMKM yang mampu menambah modal kerja, memperluas pasar, dan meningkatkan kapasitas produksi. Seorang penerima manfaat lain menegaskan: “Kalau lewat bank biasa, bunganya tinggi dan syaratnya rumit. Dengan program ini, usaha saya bisa jalan tanpa takut terlilit utang.”

Meski demikian, penelitian menemukan bahwa sosialisasi program masih terbatas. Beberapa pelaku UMKM di daerah pinggiran belum mengetahui prosedur pengajuan atau masih menghadapi kendala administratif karena status usaha mereka yang belum formal. Kondisi ini serupa dengan temuan Rahman (2021) tentang program kredit murah di Jawa Tengah, yang menunjukkan bahwa keterbatasan literasi keuangan dan formalitas usaha menjadi hambatan utama dalam inklusi pembiayaan UMKM.

Secara keseluruhan, Program Kredit Kukar Idaman berperan sebagai instrumen penting dalam mendukung pengembangan UMKM di Kutai Kartanegara. Namun, agar manfaatnya lebih merata, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif dan pendampingan administratif bagi pelaku UMKM yang masih beroperasi secara informal.

Kendala Kredit Kukar Idaman

Hadirnya Program Kredit Kukar Idaman memberikan dampak signifikan bagi pelaku UMKM di Kecamatan Tenggarong. Program ini dianggap lebih ramah dibandingkan layanan perbankan komersial karena bunga kredit 0%, persyaratan sederhana, serta proses pengajuan yang relatif cepat. Salah satu pelaku usaha kuliner menuturkan: “Proses pengajuan hanya butuh waktu sekitar dua minggu dan kami tidak diminta jaminan yang memberatkan. Itu sangat membantu usaha saya untuk menambah peralatan dapur.”

Kesederhanaan SOP dalam program ini meningkatkan rasa percaya diri masyarakat untuk mengakses kredit. Banyak pelaku UMKM yang sebelumnya enggan berhubungan dengan bank kini merasa lebih yakin mengajukan pinjaman. Hal ini berimplikasi pada peningkatan jumlah UMKM yang mampu menambah modal kerja, memperluas pasar, dan meningkatkan kapasitas produksi. Seorang penerima manfaat lain menegaskan: “Kalau lewat bank biasa, bunganya tinggi dan syaratnya rumit. Dengan program ini, usaha saya bisa jalan tanpa takut terlilit utang.”

Namun, penelitian ini menemukan adanya keterbatasan sosialisasi program. Beberapa pelaku UMKM di wilayah pinggiran belum mendapatkan informasi yang memadai mengenai prosedur pengajuan maupun manfaat program. Seorang pelaku usaha kecil di Desa Loa Kulu menuturkan: “Saya baru tahu ada program kredit ini dari tetangga, tidak pernah ada sosialisasi langsung ke desa kami. Jadi banyak teman-teman pengusaha di sini yang belum bisa ikut.” Kondisi ini menunjukkan bahwa jangkauan informasi masih belum merata, sehingga hanya sebagian UMKM yang dapat memanfaatkan program tersebut.

Dampak dari keterbatasan sosialisasi ini cukup signifikan, karena membuat efektivitas implementasi program tidak maksimal. UMKM yang tidak mendapatkan informasi tetap terjebak pada pinjaman informal dengan bunga tinggi, sehingga tujuan utama program untuk mengurangi ketergantungan pada kredit ilegal belum sepenuhnya tercapai. Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), yang menekankan bahwa komunikasi merupakan salah satu variabel penting dalam keberhasilan implementasi. Jika informasi tidak tersampaikan secara jelas dan merata, maka tingkat partisipasi masyarakat akan rendah, dan kebijakan menjadi kurang efektif.

Dengan demikian, meskipun Program Kredit Kukar Idaman terbukti membantu sebagian besar penerima, masih diperlukan strategi komunikasi publik yang lebih masif dan terstruktur. Misalnya melalui sosialisasi berbasis desa, pemanfaatan

media digital lokal, serta pendampingan aktif oleh Dinas Koperasi. Tanpa langkah ini, ada risiko program hanya efektif di wilayah perkotaan (Tenggarong) tetapi gagal menjangkau daerah terpencil di Kutai Kartanegara.

KESIMPULAN

Program Kredit Kukar Idaman di Kecamatan Tenggarong telah memberikan dampak positif dalam mempermudah akses permodalan bagi pelaku UMKM. Skema bunga 0% dan persyaratan yang relatif sederhana membuat program ini mampu mendukung pengembangan usaha masyarakat, baik skala kecil maupun menengah.

Namun demikian, implementasi program masih menghadapi hambatan, terutama pada aspek sosialisasi yang belum merata hingga ke wilayah-wilayah terpencil. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat belum memperoleh informasi yang cukup mengenai manfaat dan prosedur program.

Sebagai rekomendasi, pemerintah daerah bersama lembaga terkait perlu meningkatkan strategi sosialisasi secara intensif dan inklusif, serta memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM. Upaya ini penting agar lebih banyak pelaku usaha dapat mengakses program, sehingga tujuan utama memperkuat perekonomian daerah melalui pengembangan UMKM dapat tercapai secara optimal.

REFERENSI

- Anderson, J. E. (2019). *Public policymaking: An introduction* (9th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.
- Kasmir. (2016). *Dasar-dasar perbankan* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1973). *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland*. Berkeley: University of California Press.

- Rahman, A. (2021). Inklusi keuangan UMKM melalui kredit daerah: Studi kasus Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 145–160.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.